

BAB II

KEADAAN UMAT ISLAM DI THAILAND SELATAN

A. Sejarah Singkat Islam Pattani

Awal hubungan antara Kerajaan Thailand dan kerajaan Pattani didasarkan pada kerangka sistem sungai di mana-pemerintah lemah dan negara mengakui supremasi raja Thailand. Dalam prakteknya, mereka mengirim upeti secara berkala dalam bentuk simbolis dari perak dan emas bunga (bunga mas) ke pengadilan Thailand. Hubungan kekuasaan tersebut berteori sebagai sistem mandala dimana kekuatan paling kuat di sekitar pusat dan surut yang lebih jauh itu adalah dari pusat. Ini berarti bahwa secara historis suatu negara bawahan seperti Pattani memiliki beberapa otonomi dalam pemerintahan sendiri sambil mempertahankan status anak sungai dengan Siam.¹

Dari abad kelima belas, ketika elit selatan wilayah ini masuk Islam, keinginan untuk memasukkan negara-negara selatan ke dalam Kerajaan Thailand telah konstan. Pattani adalah pelabuhan penting untuk perdagangan dan perdagangan dengan dunia luar. Sejarah awal penaklukan dari Melayu-Muslim di bawah sistem pemerintahan karena bertujuan untuk mengamankan kerajaan Pattani sebagai bangsa jajahan atau bawahan dari Siam untuk

¹ Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand* (Bangkok: Thammasat University, 2003), 12.

memastikan itu bisa berfungsi sebagai pelabuhan masuk untuk perdagangan luar negeri raja-raja Siam.²

Secara historis, ada dua jenis kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand atas wilayah Pattani. Salah satunya adalah aturan langsung dan aturan tidak langsung. Aturan yang terlibat langsung mengirim pejabat Thailand untuk memerintah kerajaan Muslim; orang Siam dikenakan pada kelompok penguasa lokal dan penduduk. Hasil dari awal perlawanan dan ketidakpuasan para penguasa Pattani dan orang-orang yang cenderung untuk memungkinkan peran yang lebih dan kepentingan dengan elit Muslim lokal dan dengan demikian memberikan persyaratan lagi hubungan damai antara kedua belah pihak.

Dengan periode Ayutthaya ke periode Bangkok awal, para penguasa Thailand mengadopsi kebijakan memecah belah dan memerintah dalam berurusan dengan negara-negara Muslim di Selatan. Setelah banyak pemberontakan dari negara-negara Muslim, Bangkok dibagi menjadi kota-kota kecil dan melimpahkan kewenangan atas negara-negara pengikut di Selatan ke kota Thai-Buddha utama di daerah, yang bertindak atas nama Bangkok. Songkhla dan Nakhonsrithammarat adalah kota yang dipilih. Pengaturan ini mencerminkan keterbatasan birokrasi Bangkok dan keinginan untuk menguasai negara-negara jajahan jauh dengan cara politik untuk menciptakan berbagai kelompok yang kuat di kalangan elit lokal sehingga tak

² Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*, 12.

seorang elit cukup kuat untuk membuat pemberontakan berhasil melawan Bangkok. Kebijakan tersebut membagi dan aturan terbukti efektif meskipun ketidakefisienan birokrasi Siam.³

Sejarah kerajaan Ayutthaya mencatat bahwa tahun 1564 ketika Ayutthaya kerajaan terpaksa menyerah ke Burma, sebuah unit pasukan Melayu dari Pattani, yang diminta untuk datang untuk membantu Ayutthaya terhadap Birma, melihat kesempatan dan memutuskan untuk berbalik melawan raja Ayutthaya itu dengan mengelola merebut istana untuk sementara waktu. Raja dievakuasi dari istananya sebelum mencoba kemudian untuk mengusir pemberontak Melayu keluar dari Ayutthaya. Pemberontakan lain terjadi antara 1630 dan 1633 di bawah Raja Prasat Thong, dan tawaran terakhir pada tahun 1767, setelah karung Ayutthaya oleh Burma.⁴

Dimulai pada 1785 di bawah Raja Rama I, Pattani telah dimasukkan ke dalam bagian integral dari Kerajaan sebagai akibat dari ekspansi ke arah selatan dari Bangkok. Selain Kedah dan dependensinya, Bangkok juga ditambahkan ke dua negara Kerajaan jajahan baru, Kelantan dan Trengganu. Pemberontakan gagal terjadi di 1789-1791 setelah itu raja dari Patani ditangkap dan dipecat. Pemberontakan lain terjadi pada tahun 1808, Pattani dibagi menjadi tujuh Muang yang lebih kecil atau provinsi: Saiburi, Pattani,

³ Ibid., 12.

⁴ Ibid., 13.

Nongchik, Yala, Yaring, Ra-ngae, dan Rahman. Pada saat ini, raja dari Pattani berada di bawah pengawasan ketat dekat dan Bangkok.

Namun demikian, 'memecah belah dan memerintah' kebijakan tidak berhasil dalam membuat wilayah Pattani menjadi negara patuh di bawah pemerintahan Thailand. Selama abad kesembilan belas, tujuh provinsi lagi berusaha untuk memberontak terhadap otoritas Thailand meningkat atas wilayah tersebut.

Walaupun ada pemberontakan dan perlawanan dari penguasa Pattani di periode Ayutthaya dan Bangkok, mereka konflik antara kelompok istimewa dan kuat dari kedua belah pihak atas kontrol tenaga kerja dan kekayaan di daerah tersebut. Tidak sampai sejarah modern negara-bangsa tidak konflik mulai datang dari rasa rakyat identifikasi mereka agama dan budaya. Dengan munculnya nasionalisme Thailand dan ekspansionisme selama Perang Dunia II, Melayu-Muslim di Selatan yang mendalam menjadi sasaran kebijakan “Thailand-icization” Bangkok. Sejak saat itu konflik daerah kuno berubah menjadi gerakan separatis yang melibatkan semua Muslim di daerah itu, tidak hanya kelas elit.⁵

Melayu-Muslim telah menjadi warga negara Thailand, bukan karena pilihan mereka sendiri, tetapi oleh kekuatan sadar dan paksaan oleh pemerintah Thailand dalam serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk

⁵ Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand* (Bangkok: Thammasat University, 2003), 14.

menegakkan Thailand-ization provinsi Melayu, 1902-1944. Sebagai hasil dari reformasi administrasi di bawah Raja Chulalongkorn (r. 1868-1910) di tahun 1890-an, kerajaan-kerajaan tradisional, yang menikmati status otonom, telah berubah menjadi propinsi di bawah kekuasaan langsung dari Bangkok. Dalam kasus Pattani, reformasi dimulai pada tahun 1902 dan selesai pada tahun 1906, bertepatan dengan kesepakatan akhir dengan Inggris, yang meratifikasi batas-batas antara Siam dan British Malaya. Dengan reformasi itu, raja dan royalti di Pattani telah dihapus dari posisi pengaruh dan bunga dan digantikan oleh birokrat Thailand dari Bangkok.⁶

Penggabungan daerah Patani Greater (lebih besar) ke dalam sistem administrasi Thailand pada tahun 1902 tidak hanya tindakan politik sentralisasi kekuasaan oleh Bangkok, tapi apa yang lebih bermasalah dan menghancurkan adalah intervensi ke dasar masyarakat Islam dengan praktek Thai-Buddhis. Yang paling penting adalah penghapusan Syariah (hukum Islam) dan adat Melayu (hukum adat Melayu), yang merupakan dasar praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum penggabungan wilayah Pattani Raya, daerah itu diperintah oleh raja Melayu (raja). Meskipun berada di bawah kekuasaan raja Pattani Thailand, raja masih memerintah berdasarkan Syariah dan Adat Melayu. Lembaga-lembaga penting Islam adalah masjid, atau masjid di kadi Thailand, dan pondok (sekolah agama). Masjid ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi serta sebagai tempat

⁶ Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*, 14.

praktek keagamaan dan balai desa. pondok ini merupakan pusat belajar bagi masyarakat. Kedua lembaga sangat penting bagi keberadaan dan kesejahteraan bagi semua umat Islam. Pelaksanaan sentralisasi administrasi di wilayah ini pasti campur tangan dan diganti aturan lokal dan adat dengan peraturan pusat dan peraturan. Segera setelah itu, ruang provinsi menggantikan masjid lama, sebagai arti dari kedatangan pemisahan agama dari politik.⁷

Penghapusan Syariah datang sebagai hasil dari pelaksanaan undang-undang Thailand di semua daerah di bawah kedaulatan pemerintah pusat absolut. Reformasi hukum yang diperlukan sebelumnya bahwa hukum Islam yang berlaku di seluruh wilayah muslim diganti dengan hukum sekuler Thailand, kecuali untuk kasus-kasus keluarga dan warisan. Bahkan dalam kasus hukum keluarga dan warisan, keputusan hakim Muslim belum final sampai telah disetujui oleh hakim Thailand. Itu berarti hakim muslim di pengadilan reformasi, tidak seperti sebelumnya praktek, memiliki kekuatan sama sekali. Dan ketika kasus naik ke pengadilan tinggi, mereka harus menerima keputusan oleh seorang hakim Thailand yang bukan muslim. Ini terhadap kepercayaan Islam dan praktik.

Dari penggabungan awal Greater Pattani Daerah pada tahun 1902, wilayah penting yang menjadi perhatian besar bagi negara Thailand itu di bidang pendidikan, yang dianggap salah satu sarana yang diperlukan untuk

⁷ Ibid., 15.

mencapai modernisasi. Di bagian lain Thailand, reformasi pendidikan dilakukan oleh para biksu Buddha lokal dan kuil-kuil bersama dengan pejabat pemerintah pendidikan. Masyarakat Muslim memiliki sistem mereka sendiri dan bahasa pengantar. Mereka menggunakan bahasa Arab Melayu atau dalam instruksi dan menulis sambil konten adalah Islam.⁸

Ketika reformasi pendidikan datang ke masyarakat Muslim, mereka diminta untuk membaca dan menulis di Thailand dan konten itu berorientasi pada mata pelajaran sekuler dan bahkan di Buddhisme. Reaksi langsung di kalangan umat Islam adalah keengganan dalam hal mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum. Orang Melayu memandang UU Pendidikan sebagai "batas ketahanan". Mereka menuduh pemerintah Thailand dari "mencoba untuk membasmi bahasa Melayu membenci dan mengubah status alami dari generasi muda Melayu ke Siam."

Integrasi paksa-Melayu Muslim terus pada masa pemerintahan Raja Rama VI Vajiruvudh atau (r.1910-1925) yang berkampanye intens untuk menyatukan kerajaan Thailand bawah nasionalisme resmi. Melayu-Muslim di Pattani menimbulkan tantangan untuk ide raja Thailand esensi yang menekankan tritunggal bangsa, agama (Buddha) dan raja. Pemerintah mengeluarkan program pendidikan wajib Thailand untuk menanamkan rasa nasionalisme baru. Kebijakan tersebut dan praktek mempengaruhi-Muslim Melayu di Selatan karena pendidikan mereka dilakukan di masjid-masjid dan

⁸ Ibid., 17.

pondok. Syarat yang harus mengubah bahasa dan kurikulum untuk Thailand tidak bisa diterima. Pada tahun 1910 dan 1911, pemberontakan pecah di bawah kepemimpinan tertentu [pemimpin agama] para haji. Pemberontakan 1922 adalah lebih mencolok karena melibatkan beberapa pemimpin agama dan kaum bangsawan Melayu termasuk mantan raja Pattani, Raja Abdul Kadir. Tujuan dari pemberontakan itu adalah kemerdekaan.

Pada tahun 1923, pemerintah Bangkok terpaksa meninjau kembali kebijakan pendidikan wajib, penetrasi birokrasi dan keterlibatan sosial, dan ekonomi-Melayu Muslim. Kebijakan revisi memerintahkan pejabat tidak melanggar agama Islam dan bukan pajak-Muslim Melayu di Pattani lebih besar dari negara-negara Melayu di bawah Inggris, dan pejabat pemerintah yang akan ditugaskan di sana harus jujur, sopan dan tegas. Untuk saat ini, elit Melayu-Muslim di wilayah tersebut menemukan bahwa pernyataan politik mereka otonomi dan hak agama terdengar oleh para pemimpin pemerintah Thailand. Meskipun kebijakan umum asimilasi budaya dan konsolidasi kekuasaan negara Thailand belum diberhentikan, struktur politik yang berubah dan kondisi ekonomi di tahun 1930-an, baik di pemerintah pusat-Thailand dan juga di provinsi Pattani, membawa suasana baru demokrasi dan nasionalisme dari yang untuk sesaat tampaknya memberikan elit Muslim dan penduduk beberapa harapan untuk masa depan yang lebih baik.⁹

⁹ Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*, 17.

Runtuhnya kerajaan Pattani sebagai suatu kelompok etnik dan berbahasa Melayu serta beragama Islam dipaksa menjadi suatu bagian yang integral dari masyarakat Thai yang berbeda secara etnik, bahasa dan agama. Penyatuan ini banyak membawa dampak politik, ekonomi maupun kultural.¹⁰ Rahunya Melayu Pattani di Thailand Selatan, luntarnya kekuatan politik dan hilangnya peran elit tradisional mereka menimbulkan efek melemahkan umat. Bahasa Melayu yang menjadi perekat identitas mereka dan media dalam sistem pengajaran dihapuskan karena mendapat pengawasan dari penguasa Thai.¹¹

Muslim Thailand merasa dianiaya dan di bawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas (misalnya, mereka dipaksa mengambil nama-nama Thai). Sangat tidak menyenangkan di selatan dengan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap perasaan kebangsaan (Melayu) dan keagamaan penduduk. Pemerintah mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim dan menggantinya dengan sekolah Thai. Pemerintah juga mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim, tidak peduli terhadap perayaan-perayaan Islam, menganiaya, menahan dan kadang-kadang malah membunuh para pemimpin agama dan politik Muslim (antara 1973 dan 1975), sekitar lima ratus Muslim dibunuh oleh pemerintah di selatan, dan terakhir tetapi

¹⁰ Tim Penyusun Studi Islam, *Pengantar Studi Islam*, 311.

¹¹ Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 270.

tidak sepele, pemerintah memerintah Muslim untuk mengambil nama Thai yang non Muslim: demi menipisnya identitas Islam mereka.¹²

B. Kondisi Umat Islam

a. Letak Geografis

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan Daratan China, Daratan India sampai Laut China. Dengan begitu, Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama.¹³

Thailand nama resmi lain: (Prades Thai, Muang Thai; dahulu Siam). Kerajaan konstitusional di Asia Tenggara. Di sebelah Barat laut berbatasan dengan Burma, ditimur laut dengan Laos, di timur dengan Camboja, di tenggara dengan Teluk Siam, di selatan (jazirah) dengan Malaysia, di barat daya dengan Teluk Benggala. Luas: 514.000 km. penduduk: 4.9981.000. Kepadatan penduduk: 98/km. ibu kota: Bangkok (nama resmi *krung Thep*) . bahasa resmi: Thai (Siam). Agama: Buddhisme Hinaya, Islam, Kristen.

¹² M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 2003.

¹³ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 211.

Satuan mata uang: baht (100 satang). Thailand dapat dibagi dalam empat macam permukaan bumi:

- a. Tanah pegunungan Thai yang berbatasan dengan Burma yang berangsur menurun ketinggiannya
- b. Daratan rendah yang terletak di tengah
- c. Dataran pipih gunung (Per.: *montagne de la table*) berbentuk cekung yang menempati Timur laut negeri; d. Semenanjung Thai di Jazirah Malaka.¹⁴

¹⁴ Hassan Shadili, *Ensiklopedi Indonesia*, Edisi khusus, jilid 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), (SHI-VAJ), 3531.



Peta Kerajaan Thai dengan kota-kota penting.

Provinsi di Thailand	
Utara	Chiang Mai • Chiang Rai • Kamphaeng Phet • Lampang • Lamphun • Mae Hong Son • Nakhon Sawan • Nan • Phayao • Phetchabun • Phichit • Phitsanulok • Phrae • Sukhothai • Tak • Uthai Thani • Uttaradit
Timur Laut	Amnat Charoen • Buriram • Chaiyaphum • Kalasin • Khon Kaen • Loei • Maha Sarakham • Mukdahan • Nakhon Phanom • Nakhon Ratchasima • Nongbua Lamphu • Nong Khai • Roi Et • Sakhon Nakhon • Sisaket • Surin • Ubon Ratchathani • Udon Thani • Yasothon
Tengah	Ang Thong • Ayutthaya • Bangkok • Chainat • Kanchanaburi • Lopburi • Nakhon Nayok • Nakhon Pathom • Nonthaburi • Pathum Thani • Phetchaburi • Prachuap Khiri Khan • Ratchaburi • Samut Prakan • Samut Sakhon • Samut Songkhram • Saraburi • Sing Buri • Suphanburi
Selatan	Chumphon • Krabi • Nakhon Si Thammarat • Narathiwat • Pattani • Phang Nga • Phattalung • Phuket •

	Ranong • Satun • Songkhla • Surat Thani • Trang • Yala
Timur	Chachoengsao ¹⁵

Tabel.1. **Provinsi di Thailand**

Thailand merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu.

Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan monsun. Ada monsun hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta monsun yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani#Sejarah

selalu panas dan lembab. Kota-kota besar selain ibu kota Bangkok termasuk Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Chiang Mai, dan Songkhla.

Kerajaan Thai berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan Laos dan Kamboja di timur. Koordinat geografisnya adalah 5°-21° LU dan 97°-106° BT.¹⁶

Pattani terletak di Semenanjung Melayu dengan pantai Teluk Thailand di sebelah utara. Di bagian selatan terdapat gunung-gunung dan atraksi turisme seperti taman negara Budo-Sungai Padi yang berada di perbatasan provinsi Yala (Jala) dan Narathiwat (Menara). Di sini juga terdapat beberapa tumbuhan yang agak unik seperti palma Bangsoon dan rotan Takathong. Di kawasan perbatasan dengan Songkhla dan Yala pula terdapat sebuah taman rimba yang terkenal dengan gunung terjunnya, Namtok Sai Khao.¹⁷

¹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand#Geografi>

¹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani#Sejarah

Provinsi	Luas (km2)	Penduduk (jiwa)	Muslim (%)	Buddhis (%)
Pattani	2.109 km2	423.562	77,75%	22,22%
Yala	4.716 km2	256.064	60,00%	40,00%
Narathiwat	4.227 km2	419.141	80,00%	20,00%
Satun	2.669 km2	153.657	70,00%	30,00%
Total	13.721 km2	1.252.424	71,94%	28,06%

Tabel 2. Wilayah Pattani Raya

SUMBER : Kementerian Dalam Negeri Thailand, 1979.¹⁸

b. Jumlah Penduduk Islam

Di Thailand, etnis Melayu Muslim memang merupakan kelompok minoritas. Menurut sensus 1979, jumlah mereka adalah 977.282 jiwa atau 2,84% dari seluruh penduduk Thailand yang sekitar 45 juta jiwa.¹⁹ Dan ada sekitar enam juta Muslim di Thailand pada tahun 1982. Namun angka resmi

¹⁸ Surin Pitsuawan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, 13.

¹⁹ Moeflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru: Kebangkitan Islam*, 260.

jauh lebih kecil. Angka resmi hanya memberikan presentasi seluruh Muslim dengan penduduk sekitar empat persen, padahal angka yang mungkin lebih 12%. Sebenarnya hal ini merupakan bagian dari usaha pemerintah Thai untuk mengurangi pentingnya penduduk Muslim. Muslim hidup di seluruh Thailand, tetapi ada tiga daerah pemusatan Muslim: selatan, dari perbatasan Malaysia sampai Genting Tanah Kra (*Isthmus of Kra*); utara, di daerah Chiang Rai; dan wilayah ibukota.

Wilayah selatan, dulu bukan bagian dari Thailand. Sebenarnya Semenanjung Malaya berpenduduk Melayu yang dikelola dalam negara-negara kecil. Orang-orang Melayu ini memeluk Islam sepanjang abad lima belas, sebagaimana halnya dilakukan oleh hampir semua orang Melayu lainnya. Sejak abad empat belas, Thailand memulai serangan dan penaklukan Semenanjung Malaya dan memuncak pada 1767 M. dengan penaklukan semua negara Muslim sampai ke Ligor (Nachom Sri Thammarat), jadi memasukan negara-negara Muslim Jays (Chaiya), Grahi (Surat-Tsani) dan Ligor dalam imperium Thai. Dari Ligor arang Thai memperluas penaklukannya ke selatan menaklukkan lebih banyak orang Muslim, seperti Bedelug (Pathalung), Senggora (Songkhala), dan Sentul (Satun).

Dari jumlah enam jutah Muslim di Thailand pada 1982 sekitar empat juta adalah Muslim Melayu yang hidup di provinsi-provinsi selatan. Muslim di Bangkok sekitar 800.000 orang, keturunan para tawanan yang dibawah dari negara-negara Melayu. Bahwa 5.250.000 Muslim di Thailand pada 1976.

Muslim merupakan separuh penduduk wilayah selatan, satu dari empat wilayah kerajaan. Di wilayah ini (luas daerahnya 72.961 kilometer persegi), sebenarnya Muslim merupakan minoritas di provinsi-provinsi Naratiwat, Yala, Pattani, Satun, Songkhla, dan Krabi.

Harusnya ada sekitar 2.500 masjid di Thailand, tetapi pada 1976, hanya 2.078 masjid terdaftar menurut Dekrit Raja 1947 mengenai masjid. Ada 414 masjid seperti itu di provinsi Pattani, 339 di provinsi Narrathiwat, 213 di provinsi Songkhla, 196 di provinsi Yala dan 139 masjid di Ibukota Bangkok. Berdasar wilayah, ada 1.695 masjid di selatan, 364 masjid di provinsi tengah, 18 masjid di timur-laut dan hanya ada satu masjid terdaftar di provinsi timur.²⁰

Wilayah	Penduduk dalam ribuan			Masjid terdaftar
	Jumlah	muslim		
Wilayah Selatan	5.534	2.820	51,0%	1695
Wilayah Tengah	13.459	1.210	9.0%	364
Wilayah Timur laut	15.584	930	6.0%	18
Wilayah Utara	9.696	290	3.0%	1
Jumlah	44.273	5.250	11,9%	2078

Tabel 2. Muslim di Thailand, 1976

²⁰ Pitsuan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, 202.

B. Situasi Umat Islam

Jatuhnya rezim militer pada tahun 1973, dan ditegakkannya demokrasi, yang berlangsung hingga 1976 saat Jenderal Kriangsak Chomanan mengambil alih pemerintahan sipil merupakan era baru dalam dunia politik Thai. Setiap lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam urusan negara semua keburukan sosial, politik dan ekonomi yang telah ditutupi di bawah rezim diktatur diangkat kepermukaan. Demikian pula halnya dengan *unek-unek* yang selama ini terdapat di kalangan Melayu-Muslim. Berbagai kelompok bermunculan, sebagai tanggapan atas suasana yang demokratis itu dan berusaha untuk mengordinasikan urusan komunitas mereka. Dalam periode tiga tahun itulah (1973-1976) tersingkap fakta-fakta tentang segala penganiayaan, ketidakadilan dan korupsi resmi yang pada umumnya telah dilakukan terhadap kaum Muslim. Seperti di kemukakan oleh seorang ahli mengenai situasi itu, Arong Suthasat: “Akar konflik yang terjadi di empat provinsi (Melayu) itu adalah perbedaan kebudayaan dan rasa benci antara yang memerintah dan yang di perintah”.²¹

Semakin hebat konflik antara pemerintah dan kaum Muslim, semakin mendesak kebutuhan yang disarakan komunitas atas pimpinan yang lebih baik dan lebih efektif. Seperti halnya dengan semua sektor lainnya dalam kehidupan kenegaraan Thai, kaum muda dan terpelajar mengibarkan panji pembaruan politik. Para pemimpin tradisional yang memperoleh pendidikan

²¹ Ibid., 167.

di *pondok* mendapatkan dirinya tidak berdaya dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang telah terjadi selama dua dasawarsa sebelumnya. Sedikit banyaknya dapat dikatakan bahwa, upaya-upaya pemerintah untuk memasuki lembaga-lembaga pendidikan Melayu-Muslim yang tradisional, telah berhasil. Sebab, ketika datang saatnya untuk dengan sungguh-sungguh berurusan dengan para pejabat pemerintah, rakyat berpaling kepada para mahasiswa universitas dan tidak kepada para ulama tradisional.²²

Dengan demikian, perubahan dalam kepemimpinan menimbulkan perubahan dalam taktik dan bahkan dalam ideologi perjuangan komunitas Melayu-Muslim untuk memperoleh hak menentukan nasib sendiri. Pemimpin-pemimpin muda lebih canggih dan berbicara “dalam bahasa yang sama” dengan pejabat-pejabat pemerintah. Berbagai imbauan dan protes, sekarang didasarkan atas asas-asas yang diserukan oleh pemerintah sendiri: kebebasan, persamaan, dan jaminan hak-hak politik bagi semua warga negara Thai tanpa memandang asal usul ras. Kalau dimasa lalu, pekik pemersatu adalah Islam dan tekanan dilakukan pada perbedaan antara kebijakan intergrasi pemerintah dan identitas golongan Melayu-Muslim, maka sekarang yang dijadikan asas pedoman adalah persamaan dan kebebasan. Diantara para pemimpin itu, agaknya ada yang beralih: “apabila orang-orang Melayu-Muslim harus menjadi Thai-Muslim yang hidup dibawah pemerintahan Thalandi, maka mereka harus mendapat perlakuan yang sama dengan orang-

²² Pitsuan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, 168.

orang Thai lainnya (yang Buddhis)”. Kegagalan pemerintah untuk menjamin “perlakuan yang sama” itulah, yang sekarang menjadi masalah yang sulit antara para pemimpin Melayu yang lebih muda dan berpendidikan universitas dan pemerintah.²³

Ini tidaklah berarti bahwa semua pemimpin muda golongan Melayu-Muslim dapat menerima *status quo*²⁴ di bahwa kekuasaan Thai sebab keberhasilan, atau apa yang tampaknya sebagai keberhasilan, pemerintah dalam upaya pengintegrasian melalui pendidikan sekuler modern hanya terbatas kepada pemuda-pemuda Muslim yang mau dan mampu memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh pemerintah. Masih ada orang lainnya dikalangan generasi muda yang tetap melalui jalur tradisional dan melanjutkan pendidikan tinggi mereka diluar negeri, di negeri-negeri Muslim di Timur Tengah.

Mengingat lingkungan dimana mereka tinggal, mata kuliah-mata kuliah yang mereka ikuti (bagian terbesar merupakan ilmu-ilmu agama Islam), dan indoktrinasi ideologi yang mereka serap dari lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam di dunia Arab, maka dapatlah dimengerti bila mereka nantinya kembali ke Thai Selatan dengan membawa rasa kebanggaan etnik

²³ Ibid., 168

²⁴ Status quo adalah bentuk yang umum digunakan dari "statu quo" asli Latin - secara harfiah "negara di mana" - merupakan istilah Latin yang berarti keadaan saat ini atau yang ada urusan. Untuk mempertahankan status quo adalah untuk menjaga hal-hal. cara mereka pada saat ini. Frase terkait status quo ante, harfiah "negara di mana sebelumnya", berarti "keadaan yang ada sebelumnya". (http://en.wikipedia.org/wiki/Status_quo)

dan identitas Muslim yang lebih menggelora. Mereka percaya akan kemampuan mereka untuk mengelola urusan komunitas mereka dan mengharapkan akan memperoleh kesempatan untuk itu. Mereka lalu dikecewakan oleh birokrasi negara dan pejabat-pejabat pemerintah yang tidak mau memberikan kedudukan pimpinan kepada mereka. Maka tumbuhlah suatu suasana kecurigaan yang mendalam. Pemuda-pemuda yang marah dan tidak puas itu diterima dengan tangan terbuka sebagai pemimpin oleh komunitas mereka yang tradisional, mengingat mereka telah mendapat pendidikan yang baik dan menguasai ilmu-ilmu agama.²⁵

Selain itu, mereka mempunyai ikatan-ikatan yang kuat dengan gerakan-gerakan Islam di negara-negara lain, dan ikatan-ikatan itu sering mereka manfaatkan. Kontak-kontak dengan mahasiswa-mahasiswa lain selama mereka belajar di Timur Tengah, telah menyebabkan semakin besarnya perhatian diberikan kepada penderita orang-orang Melayu-Muslim di Thai Selatan. Karangan-karangan mengenai masalah kaum Muslim itu semakin sering dimuat dalam harian-harian dan majalah-majalah, baik yang sekuler maupun yang keagamaan. Organisasi-organisasi internasional memberikan perhatian yang semakin besar di bandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya kepada nasib golongan minoritas ini. Orang-orang Melayu dari Thai Selatan selalu diwakili dalam pertemuan-pertemuan seperti Konperensi Liga Dunia Islam, Konperensi Para Menlu Islam, Konperensi

²⁵Pitsuan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*. 169.

Islam Asia, dan Konperensi Liga Arab. Persoalan ini telah menjadi pusat perhatian banyak kelompok Islam. Berikut ini cuplikan dari *Journal of the Muslim World League*:

Sambil menelusuri kembali latar belakang sejarah golongan Muslim di Thai Selatan, ia (Tan Sri Abdul Aziz bin Zain, wakil presiden Organisasi Kesejahteraan Muslim Malaysia) mengatakan, bahwa mereka itu dari ras Melayu dan menganut adat dan tradisi Melayu.... Karena tragedi sejarah mereka terpisah dari sesame (Melayu) dan menjadi bagian dari apa yang sekarang merupakan kerajaan Thai. Semenjak itu, orang-orang Melayu di Selatan menaruh dendam kesumat berkenaan dengan apa yang mereka anggap sebagai penggabungan secara paksa tanah air mereka dengan Negeri Thai yang Buddhis dan berbahasa Thai. Selama lebih dari satu abad, pemerintah Thai berusaha untuk mengasimilasi warganya yang Melayu melalui kebijakan integrasi nasional yang mengharuskan setiap warga Negara menempuh pendidikan Thai, mempunyai nama Thai dan kebudayaan Thai. Upaya-upaya ini oleh orang-orang Muslim dianggap sebagai usaha untuk menindas identitas mereka, adat Melayu, agama dan kebudayaan Islam mereka. Ia menunjukkan bahwa orang-orang Melayu itu telah memberi reaksi dengan berbagai cara, mulai dari protes sampai kepada perjuangan bersenjata. Sejak 1832, telah terjadi di serentetan pemberontakan yang dapat ditumpas. Orang-orang Muslim itu tidak pernah berhenti berharap dan berjuang untuk membebaskan tanah air mereka dari dominasi Thai, apakah itu melalui pemisahan diri atau otonomi. Walaupun pemerintah Thaitelah mengambil sejumlah tindakan untuk mengambil sejumlah tindakan untuk mengambil hatiorang-orang Muslim itu, namun mereka tidak melakukan sesuatu yang kongkrit untuk membantu golongan itu mengatasi kesenjangan ekonomi, social dan pendidikan antara orang-orang Muslim itu dan penguasa-penguasa mereka, pejabat-pejabat Thai, katanya (September 1978 : 36-37.)²⁶

Yang menarik dari artikel itu adalah bahwa ini merupakan ringkasan pidato yang diucapkan oleh seorang pejabat tinggi agama dalam pemerintah Malaysia. Gambaran yang dilukiskannya sangat suram dan dimaksudkan untuk menimbulkan tanggapan emosional di kalangan umat Islam, baik yang

²⁶ Ibid., 170.

Arab maupun yang bukan Arab. Pemerintah Malaysia memerlukan sikap muhibbah Thailand untuk membendung Partai Komunis Malaya di sepanjang pebatasan bersama. Malaysia tidak ingin menimbulkan kemarahan Bangkok dengan member dukungan kepada orang-orang Melayu-Muslim di Thai Selatan. Apabila situasi memburuk dan penindasan dengan kekerasan meningkat, Kuala Lumpur akan didesak oleh organisasi-organisasi Islam internasional agar turun tangan untuk kepentingan minoritas Melayu itu. Sesungguhnya pemerintah Malaysia telah mengecam keras pemerintah Filipina yang menjalankan kebijakan penindasan di Mindanao dan Sulu di bagian selatan di negara itu. Hubungan tetangga baik yang dipupuk melalui ASEAN tidak akan mampu bertahan terhadap tekanan dari negara-negara Muslim lainnya kepada Malaysia untuk turun tangan dalam masalah golongan Melayu-Muslim di Thai Selatan. Dan itu pasti akan mengancam perdamaian dan kestabilan di kawasan itu.

Satu cuplikan lain yang menarik adalah dari “Resolusi-resolusi dan Rekomendasi-rekomendasi” Konferensi Islam Asia yang ke-1 di Karachi, tanggal 6-8 1978:

Pattani: Persoalan Pattani atau orang-orang Muslim di Thai Selatan telah dibahas dan latar belakang sejarah mereka dijelaskan, yakni ketika mereka memiliki sebuah kerajaan yang bebas dan merdeka, yang dikenal sebagai Kerajaan Melayu Pattani. Ditunjukkan bahwa dari segi agama, ras, etnik dan bahasa, mereka berbeda sama sekali dari rakyat Thai. Walaupun ada perbedaan ini, mereka bersedia hidup atas dasar koeksistensi²⁷, asalkan nyawa dan kehormatan

²⁷ <http://www.artikata.com/arti-335571-koeksistensi.html>

mereka dilindungi dan mereka dapat menikmati hak-hak kewarganegaraan sepenuhnya berdasarkan persamaan dengan orang-orang Thai, dan ada jaminan sepenuhnya bagi keselamatan agama dan kebudayaan mereka (Juli 1978 ; 24).

Kebangkitan Fundamentalisme²⁸ Islam yang sedang terjadi di dunia Muslim di dunia dewasa ini pasti akan terasa dampaknya di Thai Selatan. Majelis Masjis Tertinggi se-dunia sudah memutuskan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan dakwanya di negara-negara di mana terdapat minoritas Islam, seperti Filipina dan Thailand Selatan.

Salah satu perubahan paling penting yang telah terjadi pada golongan Melayu-Muslim di Thailand Selatan adalah terbentuknya berbagai kelompok militan yang secara terang-terangan yang bertujuan “membebaskan” daerah Melayu dari kekuasaan Thai. Sementara kelompok-kelompok itu beroperasi sendiri-sendiri di bawah pimpinan masing-masing, dalam pertengahan 1970-an ada upaya untuk mengordinasikan seluruh kegiatan mereka di bawah satu organisasi induk: Organisasi Kesatuan Pembebasan Pattani (*Pattani United Liberton Organization* - PULO). Sementara masih sulit untuk memperkirakan besarnya dukungan pada organisasi ini, ia telah mendapat banyak sekali

Koeksistensi adalah keadaan hidup berdampingan secara damai antara dua negara (bangsa) atau lebih yg berbeda atau bertentangan pandangan politiknya.

²⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Fundamentalisme>

Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fondasi). Karenanya, kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap diri sendiri lebih murni dan dengan demikian juga lebih benar daripada lawan-lawan mereka yang iman atau ajaran agamanya telah "tercemar". Kelompok fundamentalis mengajak seluruh masyarakat luas agar taat terhadap teks-teks Kitab Suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba meraih kekuasaan politik demi mendesakkan kejayaan kembali ke tradisi mereka.

publikasi dan kredibilitas melalui kegiatan-kegiatan kekerasan dan propaganda yang terus –menerus dilancarkan di dalam dan di luar daerah Melayu di Thai Selatan. Melalui organisasi inilah, bantuan dari luar negeri disalurkan kepada berbagai kelompok yang menyatakan sedang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri sekarang.

Di atas telah disinggung bahwa, golongan Melayu-Muslim di Thailand Selatan telah berganti pimpinan dan sedang bereksperimen dengan taktik-taktik baru dan bahkan dengan ideologi baru untuk mencapai tujuannya, yakni hak menentukan nasib sendiri. Dalam tahun-tahun belakangan ini, Partai Komunis Thai (CPT) dan Partai Komunis Malaya (CPM) giat membantu gerakan separatis Melayu itu. Walaupun berbagai organisasi yang bersangkutan telah membantah hal itu, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa setidaknya tujuan bersama untuk mengacaukan daerah perbatasan dan menghasut penduduk agar menentang pemerintah, telah lebih mendekatkan mereka satu sama lain. Baik CPT maupun CPM memanfaatkan kepekaan dan kebencian orang-orang Melayu-Muslim terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang sedang merongrong identitas kebudayaan mereka. CPT, umpamanya, dalam pernyataannya untuk memperingati ulang tahun ke-34 partai itu (1942-1976) menegaskan:²⁹

Rakyat berbagai nasionalitas di Muangthai harus memperoleh hak-hak yang sama; harus saling menghormati, saling mendukung dan saling membantu; harus mempunyai hak untuk menggunakan

²⁹ Pitsuawan, *Islam di Muangthai : Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, 172.

*bahasadan aksara sendiri dan melestarikan tradisi, adat-istiadat dan kebudayaan mereka yang halus. Kami menentang setiap diskriminasi dan penindasan terhadap golongan-golongan etnis akan dibentuk administrasi-administrasi otonom dalam lingkungan keluarga besar Negeri Thai. Pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat harus dilaksanakan sepenuhnya (Journal of Contemporary Asia , Vol . 7 , No : 67).*³⁰

Paragraf itu ditulis khusus untuk menghibau orang Melayu- Muslim. Kata-katanya disusun dengan cermat untuk menggugah khayalan para cendekiawan Muslim yang sedang memperjuangkan jenis program yang serupa dari pemerintah Thai semenjak masa Haji Sulong.

Dengan demikian, di antara orang Melayu di Thai Selatan ada yang mendapatkan sekutu-sekutu yang bersimpati dengan Partai Komunis Thai dan Partai Komunis Malaya. Sudah jelas bahwa konflik-konflik ideologis pasti akan terjadi kelak; tetapi untuk sementara waktu, tujuan bersama: “pembebasan nasional” merupakan sumber inspirasi yang cukup ampuh untuk mempersatukan ketiga kawan seperjuangan yang sebetulnya saling bertentangan itu; seperti yang pernah terjadi sebelumnya, ketika orang-orang Kurdi di Iran berjuang berdampingan dengan pasukan-pasukan pendukung Khomeini sebelum jatuhnya rezim Shah; begitu musuh bersama dapat disingkirkan, orang Kurdi memerangi bekas sekutunya.³¹

³⁰ *Journal of Contemporary Asia , Vol . 7 , No : 67* adalah sebuah jurnal yang dijadikan penelitian, yang ditulis oleh Surin Pitsuan dalam bukunya yang berjudul *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*

³¹ Pitsuan, *Islam di Muangthai : Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, 173.

Semua perubahan situasi yang telah dikemukakan hingga disini pada waktunya membantu meningkatkan konflik kekerasan antara orang-orang Melayu dan pejabat-pejabat pemerintah. Walaupun massa rakyat masih bersikap pasif dan belum menanggapi seruan “pembebasan”, namun meningkatnya tindakan kekerasan, penindasan dan kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh operasi-operasi politik militer, pada akhirnya akan memaksa rakyat untuk, dalam waktu singkat, menentukan sikap.

Seorang penulis revolusioner terkenal, Franz Fanon, menulis dalam bukunya yang termasyhur, *The Wretched of the Earth*

Punggung orang pribumi sudah menekan tembok, pisau sudah siap menghujan lehernya..... ia tidak akan dapat berkhayal lagi. Setelah selama berabad-abad hidup dalam dunia angan-angan, setelah berlimang dalam alam mimpi yang paling ajaib, maka pada akhirnya si pribumi, dengan pistol di tangan, berhadapan muka dengan satu-satunya kekuatan yang menginginkan nyawanya-kekuatan kolonialisme. Dan banyak di antara kaum remaja negeri yang dijajah, yang dibesarkan dalam suasana desingan peluru dan kobaran api, akan mencemoockan, dan tidak akan ragu-ragu lagi untuk mencaci makiroh nenek moyang mereka, kuda-kuda berkepala dua, mayat yang hidup kembali, dan jin-jin yang memasuki badan orang yang sedang menguap. Pribumi menemukan realitas dan mengubah menjadi pola adat istiadatnya, menjadi praktek kekerasan dan rencananya untuk merdeka (1968:58).³²

Kesadaran politik massa rakyat merupakan fungsi dari partisipasi mereka dalam penderitaan yang diakibatkan oleh struktur sosial-ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Apabila nyawa dan harta benda mereka dalam bahaya, mereka pasti akan menjadi dasar politik. Dengan

³² Ibid., 174.

demikian mereka dapat memilih : menentukan sikap dan ikut dalam gerakan untuk perubahan di bawah semacam pengarah dan pengawasan, atau keseret ke dalam konflik dalam keadaan tidak berdaya. Orang-orang Melayu di Thai Selatan tampaknya sedang hidup di tengah-tengah perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan yang akan mempunyai implikasi-implikasi yang sangat besar bagi masa depan mereka sebagai suatu golongan etnik.³³

³³ Ibid., 174.